



TINJAUAN KETAHANAN MARITIM DAN KEAMANAN MARITIM DALAM MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

Marjanuddin A Sidik , Bayu Asih yulianto,

Herlina Juni Risma Saragih, Pujo Widodo, Panji Suwarno

Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor

Abstrak

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki cakupan 2/3 wilayah yang terdiri dari perairan. Kondisi ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki limpahan sumberdaya alam yang tinggi, dengan fakta bahwa Indonesia berhadapan dengan berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan hingga Gangguan (TAHG) yang berpotensi mengancam keutuhan negara. Konsep keamanan nasional saat ini menitikberatkan aspek yang mengutamakan keamanan insani untuk melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk ancaman serta memberikan kebebasan untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia terlihat bahwa keamanan maritim berhubungan dengan kondisi lingkungan maritim yang terhindar dan bebas dari berbagai jenis ancaman terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Ketahanan dalam konsep keamanan maritim secara singkat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara optimal demi peningkatan kesejahteraan mereka. Penulisan ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber pustaka. Pengelolaan domain kemaritiman oleh Indonesia berkaitan erat dengan posisi strategis sebagai pivot dalam kedudukan yang krusial pada jalur perdagangan maupun transportasi laut maka hal ini menjadikan Indonesia memiliki bentuk tantangan tersendiri dalam pengelolaan keamanan nasional (kamnas) yang mencakup konsep keamanan maritim dengan dimensi ketahanan maritim.

Kata Kunci: Ketahanan Maritim, Keamanan Maritim, Keamanan Nasional.

PENDAHULUAN

Keamanan nasional suatu negara sejatinya berkaitan erat dengan menciptakan dan mempertahankan rasa aman dan nyaman dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Secara luas, keamanan nasional (kamnas) suatu negara berkaitan erat dengan poin-poin penting sebagai penunjang keselamatan dan keamanan seperti keamanan energi, ekonomi, lingkungan, sosial-budaya dan lain sebagainya (Yudistira dkk, 2022). Konsep keamanan nasional saat ini menitikberatkan aspek yang mengutamakan keamanan insani (*human security*) yang menghadirkan kewajiban suatu negara dalam melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk ancaman serta memberikan kebebasan untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini, terlihat bahwa terdapat hubungan antara keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) (Hidayat, 2017).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki cakupan 2/3 wilayah yang terdiri dari perairan. Kondisi ini tentu saja membuat Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki limpahan sumberdaya alam yang tinggi, namun di sisi lain fakta ini membuat Indonesia berhadapan dengan berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan hingga Gangguan (TAHG) yang berpotensi mengancam keutuhan negara (Kadar, 2015). Sehingga menjadi perhatian bersama bahwa perspektif keamanan maritim (*maritime security*) Indonesia yang berkaitan dengan konsep keamanan nasional perlu ditingkatkan melalui kerjasama baik dalam unsur pertahanan maupun dalam cakupan yang lebih luas untuk mendukung tercapainya aspek kesejahteraan (*prosperity*).

Lebih lanjut, jika dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari

tahun 2015 hingga 2019, terdapat gagasan yang besar menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang ditopang oleh lima pilar utama. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dengan fokus utama dalam membangun kedaulatan pangan melalui pembangunan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai fokus utamanya. Ketiga, komitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pembangunan jalan tol, pelabuhan, industri logistik dan perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim dengan mengajak semua mitra di Indonesia untuk bekerja sama di sektor maritim. Kelima adalah pengembangan kemampuan pertahanan maritim (Hidayat, 2017).

Pada Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, menyatakan bahwa terdapat dua ancaman besar dalam domain keamanan yang mencakup ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer berbasis pada ancaman yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan dapat mengancam kedaulatan nasional, integritas teritorial, serta keamanan nasional secara keseluruhan. Contoh Ancaman militer yaitu agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, terorisme bersenjata, ancaman terhadap keamanan laut dan udara, konflik antar masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan ancaman non-militer pada dasarnya menggunakan faktor-faktor non-militer yang diyakini dapat mengancam kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa secara keseluruhan. Ancaman ini berdimensi pada ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, informasi, dan keamanan.

Dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia terlihat bahwa keamanan maritim berhubungan dengan

kondisi lingkungan maritim yang terhindar dan bebas dari berbagai jenis ancaman terhadap wilayah kedaulatan Indonesia, hal ini tentu saja menjadi perhatian bersama dalam aspek penegakkan hukum nasional dan internasional demi mewujudkan kepentingan nasional kedepannya (Adikara dan Munandar, 2021). Sehingga dapat diterima bahwa perspektif keamanan maritim selalu merujuk pada basis “ancaman” yang berlaku dan secara garis besar dapat dikatakan bahwa kondisi aman tercapai apabila kedaulatan negara tidak lagi berhadapan dengan ancaman-ancaman dalam domain maritim seperti tindakan terorisme, penyelundupan obat-obatan, manusia, dan satwa dilindungi, tindakan pembajakan kapal, pencemaran lingkungan laut hingga eksploitasi sumberdaya laut (Bueger, 2014).

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentu saja perlu memahami dan mewujudkan keseriusan pada poin-poin krusial yang berkaitan erat dengan perspektif keamanan maritim terutama hal-hal yang berkaitan dengan keamanan insani (*human security*). Dimensi ini tidak terlepas dari perspektif ketahanan maritim (*maritime resilience*) yang berkaitan secara langsung dengan konsep keamanan maritim disamping poin-poin lainnya seperti ekonomi maritim, keselamatan dan kekuatan maritim. Sejatinnya dimensi ketahanan maritim tidak dapat dipisahkan dari konsep keamanan insani sebagai faktor utama dalam memahami keamanan maritim secara umum dengan menitikberatkan aspek ketahanan pada konsep keamanan nasional suatu negara (Al Syahrin, 2018).

Situasi keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia merupakan indikasi dalam situasi keamanan maritim di Asia Tenggara. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya berhadapan dengan Samudra Pasifik, tetapi juga

dengan Samudra Hindia. Menghadap Samudra Hindia, Indonesia juga merupakan bagian penting dari ekonomi global kepentingan ekonomi dunia, karena merupakan wilayah mayoritas di kawasan ini. Oleh karena itu, stabilitas keamanan maritim dan keamanan wilayah perairan Indonesia merupakan hal yang tidak bisa ditawar bagi Indonesia. Semua pemangku kepentingan maritim, Indonesia menempatkan laut sebagai poin penting dalam mendasarkan kepentingan nasionalnya hal ini berkaitan dengan pengembangan dan kesadaran wilayah laut dalam memastikan keamanan maritim nasional (Marsetio, 2013).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dari penulisan jurnal untuk menjelaskan perspektif *maritime resilience* dalam konsep *maritime security* guna mendukung konsep keamanan nasional Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Tulisan ini juga memberikan pandangan dan membuka cakrawala berpikir dalam memahami keterkaitan konsep keamanan maritim pada aspek ketahanan maritim yang berkaitan dengan keamanan nasional (kamnas) Indonesia.

Landasan Teori

Teori Keamanan Maritim

Keamanan maritim (*maritime security*) telah menjadi kata kunci akhir-akhir ini karena setiap aktor yang berkaitan dengan konsep ini gagal menjelaskan dengan tepat apa arti keamanan maritim. Istilah *maritime security* memiliki arti yang berbeda untuk orang dan organisasi yang berbeda tergantung pula pada kepentingan, prasangka politik, dan ideologi masing-masing (Rahman, 2009).

A.T. Mahan (1991) mengidentifikasi enam komponen kunci yang dibutuhkan suatu negara untuk menjadikan kekuatan laut sebagai basis kekuatan utama. Diantaranya yaitu :

Lokasi geografis, bentuk fisik negara, ukuran wilayah, populasi, karakter masyarakat, dukungan dan kemauan pemerintah. Selain itu, Mahan (1991) pun memahami kekuatan laut sebagai simbiosis industri domestik dan perdagangan internasional suatu negara, yang tidak dapat dipisahkan dari laut sebagai pelindung perdagangan dan industri.

Burger (2014) menjelaskan bahwa *maritime security* tidak terlepas dari tiga kerangka kerja utama dalam perumusan konsepnya. Ketiga kerangka kerja utama yang dimaksud yaitu Matriks Keamanan Maritim, Kerangka Kerja Sekuritisasi Maritim dan kelompok pengguna praktik Keamanan. Dengan menggunakan kerangka kerja matriks *maritime security* maka suatu pihak dapat memutuskan bagaimana merumuskan keamanan dalam domain maritim yang berkaitan erat dengan empat dimensi seperti : keamanan nasional, keamanan ekonomi, keamanan manusia, dan lingkungan maritim. Hal-hal yang mengarah kepada keamanan nasional didasarkan pada kepentingan nasional suatu negara sehingga keamanan nasional merupakan upaya dalam melindungi kelangsungan hidup suatu negara seperti kekuatan laut yang diwakili oleh angkatan laut untuk menunjukkan dominasi kekuatan dalam bidang maritim.

Konsep keamanan maritim yang dikemukakan oleh Barry Buzan dkk (1998) mengarah kepada interaksi dua pemikiran yang berbeda. Satu yang menggunakan kerangka keamanan tradisional dan satu yang menggunakan kerangka non-tradisional. Telah diketahui bahwa kelompok tradisional cenderung mempersempit konsep keamanan mereka (non-sekuritisasi) dan kelompok non-tradisional cenderung memperluasnya (sekuritisasi). Ketika Kelompok Tradisional Fokus pada Kedaulatan

Nasional dan Objek Acuan Identitas suatu kedaulatan negara.

Barry Buzan (1983) pun menambahkan beberapa klasifikasi ancaman terhadap keamanan nasional yang berkaitan dengan domain maritim, ancaman-ancaman tersebut antara lain: 1). ancaman militer yang merusak berbagai komponen penting suatu negara dan bahkan menghancurkan secara total negara tersebut; 2). ancaman ideologi yang berkaitan dengan dimensi politik; 3). ancaman ekonomi yang berhubungan dengan embargo ekonomi, pembatasan impor dan ekspor, pencurian barang, sumber daya alam, hingga macetnya pasokan bahan-bahan penting; 4). ancaman terhadap lingkungan ekologi yang berkaitan dengan perubahan iklim, bencana alam, polusi, degradasi lingkungan dan lain-lain (Wiranto, 2020).

Disamping itu, Timothy D. Hoyt (2003) menggambarkan perbedaan antara kedua aliran keamanan dari Mazhab tradisional dan Mazhab non-tradisional. Mazhab tradisional mendefinisikan masalah keamanan sebagai pengejaran keamanan oleh negara dan persaingan antar negara untuk mendapatkan keamanan. Sebagai contoh, eksplorasi dan kompetisi dicapai melalui konfrontasi, perlombaan senjata, dan perang. Sedangkan Aliran non-tradisional berpendapat bahwa lingkungan keamanan mencakup isu-isu keamanan domestik dan isu-isu keamanan transnasional. Dalam hal ini terdapat ancaman keamanan yang timbul dari masalah kependudukan seperti imigrasi, lingkungan hidup, dan sumber daya, dan cakupannya tidak dapat dibatasi pada tingkat nasional (Keliat, 2009).

Terdapat juga pendapat Geoffrey Till (2004), Istilah keamanan maritim merupakan istilah baru. Istilah ini menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena adanya keyakinan bahwa upaya maritim tidak lagi sekadar

tujuan tradisional yang berkaitan dengan superioritas laut dan ekspedisi operasi militer namun dalam konteks *maritime security* terdapat pemeliharaan tatanan di perairan laut (*maintaining good order at sea*) karena laut tidak hanya sebagai wilayah untuk aspek pengamanan namun berfungsi sebagai sumber utama sumber daya alam, hingga aspek penting yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Ada ketidakmampuan dalam menghasilkan pendefinisian yang paten mengenai konsep *maritime security* yang disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, diskusi tentang keamanan dan keselamatan maritim yang diterima secara global mengenai konsep *maritime security* secara istemik. Kedua, adanya beberapa penolakan dan tidak sejalan oleh beberapa pihak mengenai penyatuan konsep keamanan maritim (*maritime security*) dengan keselamatan maritim (*maritime safety*). Kedua hal sebelumnya masih berkaitan secara kontekstual namun terdapat pandangan bahwa tata kelola keamanan maritim (*maritime security*) harus dibedakan dengan rejim keselamatan maritim. Konsep keselamatan maritim tampaknya lebih memuat kepentingan organisasi pelayaran kapal di perairan manapun yang tertuang dalam gagasan dari IMO. Selain itu terdapat keraguan bahwa konsep *maritime security* yang kaku akan mengakibatkan otoritas nasional dalam pengelolaan laut menjadi sangat berkurang (Keliat, 2009).

Di Asia, konsep keamanan maritim (*maritime security*) telah menjadi masalah karena tuntutan pembangunan regional sebagai pusat perdagangan dunia, dan ada tiga fenomena yang penting sesuai dengan isu kontemporer seperti : peningkatan volume perdagangan antar negara, peningkatan permintaan sumber daya laut, dan peningkatan jumlah armada perdagangan. Kondisi tersebut menjadikan laut sebagai sarana yang

paling penting dan dapat diandalkan oleh negara-negara di kawasan Asia sebagai jalur perdagangan, media pelayaran, dan media pengembangan sumber daya kelautan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam bentuk konsensus berupaya menghimbau negara-negara Asia untuk senantiasa berupaya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah maritimnya dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu segala aktivitas di wilayah maritim kawasan (Edrian, 2017).

Teori Ketahanan Maritim

Konteks ketahanan maritim (*maritime resilience*) sejatinya berkaitan dengan induk dalam ketahanan nasional. Pendekatan ketahanan nasional Republik Indonesia berkaitan dengan aspek lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh faktor penentu alamiah seperti geografi, demografi, sumber daya alam, dan faktor penentu sosial yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. *Maritime resilience* secara langsung berkaitan dengan ketahanan masyarakat pesisir yang perlu dipertimbangkan dalam membahas konsep keamanan maritim dan keamanan nasional (kamnas), hal ini berhubungan langsung dengan keamanan insani (*human security*) untuk memfokuskan pertimbangan keamanan pada kebutuhan manusia di suatu negara. Poin utama dari keamanan insani yaitu ketersediaan makanan, tempat tinggal, hingga pekerjaan yang aman. Dalam hal ini, laut dan sumberdaya perikanan merupakan sumber makanan bagi sebagian besar masyarakat pesisir dan industri yang bergerak dalam domain maritim. Oleh karena itu konteks *maritime resilience* dalam konsep *maritime security* dalam hal kebijakan pemerintah sangatlah penting bagi Indonesia dan negara-negara lainnya dengan wilayah laut yang luas untuk meredam berbagai ancaman dan

aktivitas ilegal yang terjadi seperti terorisme maritim, pembajakan hingga penangkapan ikan secara ilegal yang mempengaruhi keamanan manusia di laut. Disamping itu, konteks *maritime resilience* juga memiliki lingkup yang lebih luas, mulai dari keselamatan pelaut hingga kerentanan penduduk pesisir terhadap ancaman yang lebih luas di masa depan. Maka ketahanan penduduk pesisir telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam munculnya ancaman laut dan menjadi perhatian bersama oleh berbagai pihak dalam upaya pencegahannya (Gaspar, 2005).

Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani ketahanan maritim (*maritime resilience*) di berbagai dimensi, termasuk pertahanan dan keamanan. Hal ini berkaitan dengan batas-batas yurisdiksi nasional dan selalu menghadapi suatu kendala, terutama terjadi pada negara-negara kepulauan yang tertarik untuk mengekstraksi sumber daya alam laut, termasuk hasil laut seperti perikanan dan sumberdaya energi mineral bawah laut seperti minyak dan gas. Kasus-kasus seperti Sipadan dan Ligitan, Laut Ambalat, dan Laut Natuna Utara adalah contoh nyata dari sengketa perbatasan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan konflik dan perselisihan antar negara. Sebagai negara kepulauan, tentu saja Indonesia harus terus meningkatkan yurisdiksi maritimnya untuk menghadapi peluang dan ancaman yang ada di sekitarnya (Putra dan Hakim, 2016).

Konteks ketahanan maritim (*maritime resilience*) tidak terpisahkan dengan budaya maritim Indonesia. Selama ini, wilayah laut dan potensinya masih sering dilupakan, sehingga perlu dalam membentuk kembali budaya maritim untuk menjadikannya sebagai bagian integral yang penting dalam membentuk ketahanan maritim bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berada di poros maritim

dunia. Masyarakat Indonesia harus mandiri dalam memahami potensi dan fungsi strategis laut. Proyeksi di masa depan, Indonesia harus mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya laut secara tepat dan berkelanjutan, untuk mencapai ketahanan maritim dalam skala nasional, diperlukan penguatan aspek infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan tentu saja keamanan maritim (Bastari, 2021).

Budaya dan ketahanan maritim (*maritime resilience*) merupakan aspek kunci dalam mendukung visi kemaritiman Indonesia. Bangsa Indonesia harus memahami seberapa pentingnya budaya dan konteks *maritime resilience* untuk dijadikan landasan utama dalam mengembalikan kembali kejayaan sebagai bangsa maritim. Warisan-warisan yang dijadikan sebagai kearifan lokal pada komunitas masyarakat pesisir dengan dukungan kebijakan oleh pemerintah dapat menciptakan poin *maritime resilience* yang kuat, sehingga mendukung ketahanan nasional yang tinggi. Hal-hal ini tentu saja berpengaruh dalam menyusun kejayaan maritim Indonesia, sesuai dengan teori kejayaan maritim yang disampaikan oleh Alfred T. Mahan dalam Adams KR (2003), yang menyatakan bahwa karakter suatu bangsa di sektor kelautan berupa budaya maritim suatu masyarakat merupakan unsur penting dalam memajukan dan berjayanya suatu negara, jika hal ini diberdayakan maka tentu dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan maritim suatu negara.

Dengan pertumbuhan fenomena *maritime security* yang berkembang saat ini, penting bagi negara untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan seluruh pengguna laut dan secara khusus yang melakukan pelayaran di perairan yurisdiksi nasional Indonesia sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada. Indonesia, sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada mengikuti aturan

dalam Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS). Perubahan lingkungan strategis juga mempengaruhi hubungan antara negara tetangga dan negara pengguna. Sebagai contoh, perubahan lingkungan strategis di Selat Malaka dan Singapura yang terletak di perairan Indonesia memberikan peluang untuk mengkaji hubungan di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, selain itu harus juga dilakukan pengkajian tentang potensi maritim baik dalam bentuk peluang maupun ancaman, serta kaitannya dengan negara-negara pengguna, terutama Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang bergantung pada penggunaan Selat Malaka sebagai jalur transportasi ekonomi nasional (Desker, 2007).

Pada Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008) menyatakan bahwa Selat Malaka yang dikuasai Indonesia dianggap sebagai wilayah di Asia Tenggara yang menjadi perhatian dunia internasional, karena mayoritas lalu lintas perdagangan untuk kawasan Asia Pasifik melewati wilayah ini. Letak geografis Selat Malaka pun mendorong keinginan negara-negara besar untuk memainkan peran langsung dalam menjamin keamanan Selat Malaka. Ketahanan maritim yang baik, dapat diproyeksi dalam melindungi pertahanan dan keamanan suatu negara yang berbasis perairan, maka konteks ketahanan maritim (*maritime resilience*) yang dicanangkan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia menjadi poin penting dalam perwujudan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam hal ini, terdapat lima elemen kunci yang harus terlibat dalam proses membangun ketahanan maritim yaitu faktor posisi geografis Indonesia yang strategis, luas wilayah dengan 2/3 merupakan perairan, jumlah penduduk yang besar, karakter bangsa yang kuat, dan pemerintah yang berdaulat. Elemen-elemen penting ini bisa mengoptimalkan konsep dan definisi

ketahanan maritim secara baik dan mendorong transformasi ekonomi berbasis maritim.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian literatur disusun menggunakan metode deskriptif analisis dengan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku dan artikel yang berkaitan dengan topik pengkajian sesuai dengan pembahasan yang diangkat. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa metode kualitatif menitikberatkan penelitian pada kondisi objek secara alamiah dan dalam hal ini peneliti merupakan instrumen kunci dengan melakukan teknik pengumpulan data secara gabungan (triangulasi) serta hasil penelitian menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi. Sejalan dengan hal ini, Hardani dkk (2020) berpendapat bahwa penelitian kualitatif berangkat dari pendekatan deduktif-induktif yang tersusun dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya dan kemudian dikembangkan menjadi problematika beserta pemecahan masalah untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris yang tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sistemik global, pengelolaan domain kemaritiman oleh Indonesia sebagai negara kepulauan tentu berkaitan erat dengan posisi strategis Indonesia sebagai *pivot* dalam kedudukan yang krusial pada jalur perdagangan maupun transportasi laut mengingat 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan maka hal ini menjadikan Indonesia memiliki bentuk tantangan tersendiri dalam pengelolaan keamanan nasional (kamnas) yang mencakup konsep keamanan maritim (*maritime security*) dengan dimensi ketahanan maritim (*maritime resilience*).

Oleh karenanya, perlu perspektif yang mendalam terkait dengan *maritime security* dan *maritime resilience* dalam konsep keamanan nasional Indonesia sebagai basis negara kepulauan (*archipelago*) terbesar di dunia.

Perspektif *Maritime Security*

Keamanan maritim (*maritime security*) menjadi suatu istilah yang terus digunakan secara global seiring dengan munculnya berbagai tantangan hingga tingkat ancaman dalam domain maritim yang mengharuskan adanya berbagai kebijakan dan tindakan yang diinisiasi untuk mengatasinya. Laut sebagai suatu spektrum yang unik dengan segala aktivitas yang ada menempatkan *maritime security* dalam mengeksplorasi hubungan dengan konsep-konsep lain secara terstruktur dan berimbang. Konsep-konsep yang dimaksud meliputi keamanan laut, pertahanan maritim, ekonomi kelautan dan ketahanan maritim (*maritime resilience*). Konsep *maritime security* diyakini menjadi faktor yang berkaitan dengan munculnya ancaman di laut yang mengarah pada *maritime terrorism* dan diikuti juga dengan berbagai laporan secara global mengenai *sea piracy and robbery* dalam rentang waktu 2008-2011 (Yudistira dkk, 2022).

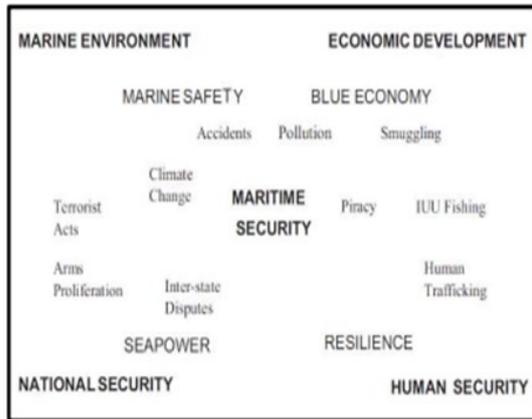
Keamanan maritim (*maritime security*) merupakan faktor kunci bagi pemerintah yang berhasil mengadopsi tata kelola maritim yang baik, dan bisa memungkinkan negara untuk memitigasi risiko, mengelola masalah, dan melindungi rakyat serta kepentingan nasionalnya dari semua ancaman di sektor maritim. Dalam hal ini, negara harus memiliki doktrin maritim sebagai kerangka kerja politik dan perspektif nasional tentang keamanan maritim. Negara harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang semua aspek masalah keamanan maritim dan mengomunikasikannya kepada para

pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang keamanan maritim. Akhirnya, negara dapat membangun kekuatan laut sebagai implementasi dari tata kelola maritim (Edrian, 2017).

Indonesia memiliki reputasi yang buruk di sektor maritim, terutama dalam hal keamanan maritim (*maritime security*). Klasifikasi perairan yang tak terkelola dengan baik disematkan oleh negara-negara maju kepada Indonesia dan tentu saja ini merupakan bukti bahwa Indonesia masih dianggap belum mampu menjamin keamanan maritim di wilayahnya. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara, bahkan di kawasan Asia Pasifik, memiliki hubungan ketergantungan dengan kebijakan yang berkaitan erat pada konsep keamanan maritim (*maritime security*) Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan. Dengan empat dari sembilan jalur lintas laut strategis di dunia dan tiga ALKI yang menghubungkan kawasan Samudra Hindia dengan Pasifik dan Asia Timur dengan Australia, Indonesia merupakan sumber daya geoekonomi, geostrategis, dan geopolitik (Wiranto, 2020).

Mempelajari hubungan antar konsep keamanan maritim dengan konsep lainnya seperti konsep keselamatan maritim, pertahanan, ekonomi hingga ketahanan dapat membantu dalam memahami garis besar yang terjadi ketika berhadapan dengan permasalahan dalam domain maritim. Tentu saja konsep ini tersusun dalam suatu matriks yang mampu memetakan pemahaman dan mencegah bias dalam menggali berbagai aspek di dalamnya seperti pemahaman dasar mengenai *maritime security*, kebijakan yang berkaitan dengannya hingga aktor-aktor yang berbeda dalam menempatkan permasalahan keamanan maritim yang terjadi. Sehingga dalam hal ini, Bueger (2014) memetakan empat dimensi utama di dalam matriks keamanan

maritim (*maritime security*) yang meliputi *marine environment*, *national security*, *economic development* dan *human security*.



Gambar 1. Matriks Konsep Keamanan Maritim

Sumber : Bueger, 2014

Dalam konteks keamanan nasional (kamnas), Saraswati dan Pinatih (2020) mengungkapkan bahwa batasan *maritime security* seringkali berubah dari waktu ke waktu tergantung dimensi yang sedang terjadi saat itu. Misalnya, pada saat tertentu *maritime security* erat hubungannya dengan perang di lautan (*naval warfare*) hingga konsep *sea power* yang berkaitan dengan upaya melindungi dan mempertahankan eksistensi kedaulatan suatu negara, namun di sisi lain *maritime security* juga dominan dalam mengangkat isu-isu seputar *marine safety* dengan cakupan perlindungan lingkungan maritim secara keseluruhan. Perspektif *maritime security* pun lebih luas dikaitkan dengan perkembangan ekonomi yang mengarah kepada *blue economy* hingga mencakup poin-poin penting dalam keamanan insani (*human security*) hingga bahasan yang berkaitan dengan ketahanan maritim (*maritime resilience*). Sehingga konsep *maritime security* yang digambarkan dengan matriks Bueger (2014) pun relevan dengan menempatkan domain ancaman yang muncul di suatu perairan.

Isu *maritime security* merupakan eskalasi dalam lingkup nasional dan global secara sistemik bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan cakupan wilayah perairannya sebesar 70%. Maka Indonesia dihadapkan dengan permasalahan *maritime security* yang mengancam kedaulatan negara dan menjadi perhatian bersama bagi pemerintah sebagai aktor utama. Potensi ancaman yang bersifat non-tradisional seperti : pembajakan oleh terorisme maritim, perompakan, penyelundupan obat-obatan, senjata api ilegal, penyelundupan manusia dan satwa dilindungi, kerusakan antar pengguna laut dan sebagainya tentu saja dapat dinilai sebagai hal-hal yang berdampak pada kerentanan dari aspek keamanan hingga mengganggu stabilitas ekonomi baik secara kawasan hingga meningkat menjadi ancaman nasional jika tidak ditanggulangi dengan baik (Listiyono dkk, 2021).

Kebijakan nasional Indonesia dalam mendorong hal-hal yang terkait dengan kebijakan kelautan nasional merupakan rumusan dalam bertindak untuk mencapai pengembangan atau eksploitasi aset maritim negara Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan secara terkoordinasi dan terencana secara maksimal, mengingat kebijakan kelautan nasional yang mengarah kepada konsep *maritime security* mencakup semua kegiatan di lingkungan laut. Kebijakan kelautan Indonesia pun turut berkontribusi pada pemanfaatan sumber daya laut yang langka. Sehingga kemampuan dalam mengeksploitasi atau mengoptimalkan laut dan sumber daya kelautannya. tentu berperan sebagai sarana untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia (Suwarno dkk, 2021).

Sebagai contoh dalam konsep ini bagi Indonesia selaku negara kepulauan, maka dalam rangka mengatasi masalah *maritime security*, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memfokuskan pada peningkatan kerja

sama di bidang keamanan maritim, serta penguatan diplomasi dan penguatan TNI AL misalnya. Tentunya pemerintah menjadi aktor penting yang disegani dan sangat berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik (Liow & Shekhar, 2014). Visi presiden adalah agar TNI Angkatan Laut memainkan peran utama dan mampu melakukan operasi keamanan di perairan teritorial di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan melindungi hak-hak Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Dalam konteks *maritime security*, terdapat konsep kekuatan laut (*sea power*) yang berorientasi pada peran kekuatan angkatan laut dalam mengelaborasi strategi untuk penggunaan laut. Jika dilihat, peran kapal perang di masa damai sangatlah penting dalam melindungi jalur komunikasi laut untuk memfasilitasi jalur perdagangan serta mendukung kemakmuran ekonomi dengan cara penangkalan, pengawasan dan pelarangan/interdiksi. *Sea power* berkaitan dengan fakta dimana angkatan laut merupakan aktor utama dalam menciptakan stabilitas *maritime security* yang baik dan mampu bertindak di luar perairan teritorial hingga memasuki wilayah lain diluar wilayah sendiri untuk menunjukkan kehadiran di perairan internasional (Till, 2004).

Poin lain dari *maritime security* menyangkut dengan konteks *marine safety* atau keselamatan laut, konteks ini turut membicarakan pentingnya keselamatan kapal hingga instalasi dalam domain maritim dengan tujuan utama untuk melindungi para profesional maritim dan lingkungan laut secara umum. Dalam hal ini, *International Maritime Organization* (IMO) dan *Maritime Safety Committee* (MSC) selaku badan yang mengawasi pengembangan aturan dan peraturan keselamatan laut berperan penting sebagai patokan yang diikuti oleh semua negara pelayaran. *Marine safety* juga

semakin terkait dengan *maritime security* dengan melihat perkembangan industri maritim dan perusahaan pelayaran yang merupakan target potensial bagi perompak atau kriminal laut hingga keterlibatan dalam kejahatan maritim lainnya seperti penyelundupan barang-barang secara ilegal, perdagangan manusia, senjata dan lain-lain (Yudhistira dkk, 2022).

Konsep *Maritime security* juga secara mendalam membahas konteks pembangunan ekonomi (*blue economy*). Indonesia khususnya sebagai negara kepulauan tentunya menempatkan lautan sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat bahwa mayoritas aktivitas perdagangan dilakukan melalui jalur laut dan perikanan merupakan bidang industri yang signifikan dan berkembang pesat. Anwar (2018) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki laut dengan segudang sumber daya alam yang sangat penting, seperti minyak, dan bahan tambang dari dasar lautan, dalam hal ini juga pariwisata pantai menyumbang sumber pendapatan ekonomi yang penting. Hingga pada akhirnya berdampak pada ketersediaan makanan, ketersediaan tempat tinggal, kehidupan berkelanjutan, dan tersedianya lowongan kerja yang aman. Konsep *blue economy* bertujuan dalam mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan ekonomi dengan strategi manajemen berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga dalam hal ini *maritime security* hadir dalam proses pemantauan hukum, peraturan hingga pengaturan lingkungan laut yang aman dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Selain itu, sudut pandang ekonomi yang berbasis pertahanan, berkaitan dengan karakteristik tenaga kerja yang dapat dikirim sebagai tenaga kerja maritim, namun dalam situasi Indonesia saat ini jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang tepat sasaran

maka menimbulkan banyak tantangan. Tenaga kerja poros maritim Indonesia merupakan fokus utama bagaimana pemerintah dapat mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu menghadapi ancaman keamanan tradisional hingga non-tradisional dan perubahan operasional yang cepat. Ide kembang dalam konteks ini yaitu adanya keterkaitan antara prospek ekonomi dan pengembangan kebijakan dalam konteks keamanan (Asch *et al*, 2007).

Konteks terakhir dalam konsep *maritime security* berkaitan dengan ketahanan penduduk pesisir atau *maritime resilience* yang berkaitan erat dengan keamanan insani (*human security*). Kelompok pengguna praktek keamanan (*Security Practice and Communities of Practice*) berpendapat bahwa konteks *human security* merupakan salah satu aspek utama yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka *maritime security*. Hal ini menitikberatkan pada faktor utama untuk memahami keamanan dalam konteks ketahanan nasional yang bertujuan untuk memusatkan pertimbangan keamanan pada kebutuhan manusia pada suatu negara (Putra dan Hakim, 2016).

Perspektif Maritime Resilience

Pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia khususnya menempatkan sumber daya laut dan industri maritim sebagai prioritas yang menjanjikan, hal ini berkaitan dengan potensi wilayah laut yang luas dengan estimasi sumber daya perikanan yang tinggi, namun terdapat kejadian berupa aktivitas perikanan yang ilegal dan menjadi masalah utama serta berdampak pada keamanan insani (*human security*). Sehingga konteks keamanan insani (*human security*) memiliki dimensi maritim yang luas dalam konsep *maritime security*. Hal ini berkaitan dengan keamanan pelaut

dalam melakukan pelayaran hingga kerentanan populasi suatu komunitas pesisir dalam menghadapi ancaman-ancaman masa depan yang lebih luas, khususnya ketahanan maritim (*maritime resilience*) yang telah diidentifikasi sebagai faktor kunci atas kemunculan tiap ancaman maritim dan sangatlah penting upaya-upaya preventif di dalamnya, maka hal ini menjadi perhatian bersama bagi kementerian atau lembaga yang membidangi hal tersebut.

Maritime resilience masuk ke dalam salah satu potensi yang berhubungan secara luas dengan kekuatan maritim Indonesia. Jika dilihat dalam hukum nasional Indonesia, kekuatan angkatan laut pun berkaitan dengan koordinasi atas berbagai armada sipil seperti armada perdagangan, armada penangkapan ikan, dan armada-armada lainnya dengan mempertimbangkan potensi ketahanan maritim serta armada transportasi, dan industri jasa maritim dengan dampak yang besar pada pengembangan ekonomi secara nasional bagi Indonesia kedepannya (Putra dan Hakim, 2016).

Maritime resilience merupakan salah satu poin penting yang mendasar dalam pengembangan konsep *maritime security*. Jika dilihat hubungan *maritime security* sebagai konsep dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara berbasis kepulauan maka konteks ketahanan (*resilience*) berhubungan dengan keamanan insani (*human security*) yang mengarah kepada kebutuhan pangan, sandang dan pendukung lainnya seperti makana, tempat tinggal, mata pencaharian yang berkelanjutan hingga suatu pekerjaan yang terjamin (Bueger, 2014).

Ketahanan dalam konsep keamanan maritim bagi masyarakat pesisir secara singkat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara optimal demi peningkatan kesejahteraan

mereka dan pemerintah selaku aktor kunci turut menjamin keamanan mereka (*human security*) di laut dari segala ancaman yang dapat membuat masyarakat tidak dapat menggunakan laut untuk kesejahteraan mereka. Ancaman yang dimaksud yaitu IUU *fishing*, terorisme maritim, pembajakan dan lain-lain.

Konteks *maritime resilience* yang erat kaitannya dengan *human security* juga mendalami masalah-masalah sosiologi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat, kelompok minoritas, dan masalah-masalah sosial lainnya yang bersinggungan dengan masalah ekonomi dan politik. Di samping itu, secara global pentingnya konteks *human security* pun kian meningkat setelah adanya laporan UNDP tentang *Human Development Report* (1994). UNDP pun menjelaskan terdapat 7 dimensi penting dalam menciptakan *human security* yakni keamanan pada bidang ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik (Hadiwinata, 2017).

Di samping itu, perwujudan terhadap *maritime resilience* yang berkelanjutan merupakan bagian integral yang diwujudkan melalui keterlibatan dari berbagai pihak, salah satunya dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan menerapkan pendekatan *collaborative governance*. Program pemerintah yang berkaitan dengan *maritime resilience* sebagai ujung tombak kegiatan kemaritiman harus didukung dengan faktor-faktor penting misalnya pembangunan infrastruktur terutama di wilayah yang sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat pesisir. Selain itu, kebijakan dalam bidang ekonomi masyarakat pesisir juga perlu diperhatikan oleh pemerintah terutama pada usaha yang mempunyai

value dan berdampak pada peningkatan ekonomi kemaritiman, sebagai contoh kebijakan terkait dengan biaya logistik yang berpengaruh besar dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Sehingga nantinya menunjang keamanan dan keberlanjutan pada bidang ekonomi dan memacu tingkat kesejahteraan yang lebih optimal (Chotimah dkk, 2021).

Pemerintah Indonesia sebagai aktor kunci tentunya berperan aktif dalam meningkatkan pengembangan *maritime resilience* di berbagai wilayah pesisir Indonesia perlu mengidentifikasi berbagai keunikan yang menjadi keunggulan masyarakat pesisir seperti kearifan lokal pada masing-masing daerah. Identifikasi ini sangat berpengaruh pada berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai budaya atau luhur nenek moyang mereka. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan langkah efektif dalam menentukan program pemberdayaan untuk menguatkan konteks *maritime resilience* yang sesuai dengan kondisi masyarakat maritim yang ada (Fride dan Saputra, 2022).

Kearifan lokal masyarakat pesisir pun mampu menambah ragam dalam wawasan kemaritiman Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam latar belakang seperti suku, agama, bahasa hingga ras dan lain-lain, maka kearifan lokal dalam konteks *maritime resilience* merupakan salah satu instrumen penting yang mampu menjadi kekuatan untuk menguatkan pengetahuan hingga pembangunan masyarakat pesisir yang ada di Indonesia. Contoh kearifan lokal yang ada yaitu kearifan lokal masyarakat Aceh yang memiliki "Smong" sebagai alat pendeteksi keselamatan dari adanya bahaya laut seperti Tsunami selain itu di Jogjakarta terdapat cerita mitologi "Nyi roro kidul" yang memiliki penafsiran

secara harfiah bahwa sebenarnya laut bagian selatan berbahaya karena memiliki ombak yang besar ((LIPI Press, 2020). Disamping itu, terdapat “Awig-awig” di Lombok dan “Panglima Laot” di Aceh, terdapat juga “Polisi Pecalang” di Bali hingga “Sasi” di provinsi Maluku. Hal ini tentu saja dapat menumbuhkan nilai-nilai budaya maritim dengan maksud untuk melestarikan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pandangan masyarakat ketika berinteraksi dengan lingkungannya (Tahara dan Bahri, 2018).

Sehingga ketahanan nasional Indonesia perlu disusun dengan perencanaan yang baik dan dimulai dari ketahanan berbagai desa yang kuat, yakni dari aspek ketahanan bencana alam, aspek ketahanan sosial-budaya, hingga aspek ketahanan maritim (*maritime resilience*). Tentu saja berbagai aspek ketahanan diperkuat dengan mengoptimalkan kapasitas hingga kesadaran masyarakat melalui nilai-nilai luhur atau kearifan lokal, kesadaran masyarakat dan kehadiran pemerintah melalui program-program pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan hingga kapasitas desa sebagai komponen yang penting dan kuat dalam menangkal ancaman-ancaman di domain keamanan maritim (*maritime security*).

Selain itu, jika ditelusuri dengan teliti maka terdapat satu faktor yang mengungkapkan rendahnya *maritime resilience* negara Indonesia, yakni kurangnya perhatian dalam kebijakan yang mendasari peningkatan aspek *maritime resilience* berbasis aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, pertahanan dan keamanan hingga aspek sosial-budaya. Rendahnya faktor *maritime resilience* negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan misalnya dilatarbelakangi oleh komposisi anggaran pertahanan dan keamanan matra laut yang berimplikasi dengan tidak memadainya konsistensi penjagaan sumberdaya laut hingga luas

wilayah yang sangat besar. Sehingga hal ini berimbas pada aspek-aspek lain yang sama pentingnya dalam membangun ketahanan maritim (*maritime resilience*) Indonesia (Bastari, 2021).

Untuk mendukung *maritime security* yang diwujudkan melalui konteks *maritime resilience*, perlu dalam merancang dan membuat program terhadap komunitas masyarakat pesisir agar mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan memotivasi untuk berkembang dalam melaksanakan program tersebut. Keterlibatan masyarakat juga perlu dan sangat penting dalam bentuk partisipasi terhadap program-program pemberdayaan agar dapat berjalan dengan baik. Mengingat masyarakat pesisir atau nelayan merupakan subjek/informan utama di laut maka kontribusi dalam mendukung *maritime security* sangatlah penting, terutama jika melibatkan kegiatan yang berbasis dengan sentuhan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir (Mariana, 2023).

Faktor kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kata kunci dalam studi keamanan manusia yang disandarkan pada konteks *maritime resilience*. Hal ini berkaitan dengan faktor pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya melibatkan partisipasi dalam program pemberdayaan sebagai pelaksana program, tetapi juga berpartisipasi dalam perumusan dan pembuatan program sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan termotivasi untuk melaksanakan program dengan baik (Yuliarta dan Rahmat, 2021).

SIMPULAN

Perspektif *maritime resilience* dirasa sangat penting dan cakupannya menyangkut dengan poin-poin dalam keselamatan insani hingga berkaitan dengan kesejahteraan suatu komunitas

masyarakat pesisir. *Maritime resilience* sebagai salah satu konteks dalam matriks *maritime security* memerlukan perhatian dan kebijakan yang tepat oleh pemerintah Indonesia guna mendukung konsep keamanan nasional, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia maka perwujudan terhadap *maritime resilience* yang berkelanjutan merupakan bagian integral yang diwujudkan melalui keterlibatan dari berbagai pihak sebagai ujung tombak kegiatan kemaritiman untuk menunjang keamanan dan keberlanjutan serta memacu tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal.

Ketahanan dalam konsep keamanan maritim bagi masyarakat pesisir secara singkat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya laut secara optimal. Konteks *maritime resilience* yang erat kaitannya dengan *human security* juga mendalami masalah-masalah sosiologi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat, kelompok minoritas, dan masalah-masalah sosial lainnya yang bersinggungan dengan masalah ekonomi dan politik. Kearifan lokal atau *local wisdom* masyarakat pesisir pun mampu menambah ragam dalam wawasan kemaritiman Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam latar belakang seperti suku, agama, bahasa hingga ras dan lain-lain, maka kearifan lokal dalam konteks *maritime resilience* merupakan salah satu instrumen penting yang mampu menjadi kekuatan untuk menguatkan pengetahuan hingga pembangunan masyarakat pesisir yang ada di Indonesia. Disamping itu, hubungan antara konsep *maritime security* dengan konteks *maritime resilience* menitikberatkan faktor utama dalam memahami keamanan yang berujung pada ketahanan nasional dengan tujuan

untuk memusatkan pertimbangan keamanan pada kebutuhan manusia pada suatu negara. Sehingga kedepannya pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia dari dua perspektif sebelumnya berdampak signifikan dan mengurangi ancaman-ancaman masa depan dalam domain maritim yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, KR., (2003.) *Attack and Conquer, International Anarchy and the Offense/Defense Deterrence Balance*, International Security Winter 04. Vol. 28, No 8. Pp. 53.

Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 83-101. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>

Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>

Asch, B.J., Hosek, J.R., & Warner, J.T. (2007). *New Economics Of Manpower In The Post-Cold War Era*. In T. Sandler, & K. Hartley, *Handbook of Defense Economics*. UK: North-Holland

Bastari. A. (2021). *Buku Budaya Maritim Dalam Perspektif Ketahanan Nasional*.

Bueger, C. 2014. "What Is Maritime Security?" *Marine Policy*. 53, 159-164. December 27, 2014. DOI: 10.1016/j.marpol.2014.12.005.

Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Departemen Pertahanan, 2008)

Buzan, Barry. Waever, Ole and de Wilde, Jaap (1998). *Security: a new framework for analysis*. Lynne Rienner Publisher, Colorado

Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2021). Model *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348-376.

- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Departemen Pertahanan RI
- Desker, B. 2007. *Re-thinking the safety of navigation in the Malacca Strait* dalam Kwa Chong Guan dan John K. Skogan (eds.) *Maritime Security in Southeast Asia*. Routledge. London.
- Edrian, M. (2017). Melihat Keamanan Maritim Indonesia Dari Ide Poros Maritim. *DEFENDONESIA*, 2(2), 17-24.
- Fride, T., & Saputra, A. F. (2022). Pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara Bakamla Dalam Meningkatkan Stabilitas Keamanan Maritim. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(7), 2480-2487.
- Gasper, D. (2005) *Securing Humanity: Situating 'Human Security' As Concept And Discourse*. Journals Hum Dev
- Hadiwinata, B. (2017). Poverty and the Role of NGOs in Protecting Human Security in Indonesia. In *Non-Traditional Security in Asia* (pp. 210-236). Routledge.
- Hardani, Andriani, Helmina, Ustiaawaty, Jumari, Utami, Evi Fatmi, Istiqomah, Ria Rahmatul, Fardani, Roushandy Asri, Sukmana, Dhika Juliana, & Auliya, Nur Hikmatul (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (H. Abadi (Ed.); ke-1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, hlm. 254.
- Hidayat, S. (2017). Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), 89-104.
- Kadar, A. 2015. Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. 1, No. 3, 2015. DOI: 10.31599/jkn.v1i3.33
- Keliat, M. (2009). Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 111-129.
- Liow, J.C., & Shekhar, V. (2014). Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead. Di akses Mei 2023, dari <https://www.brookings.edu/articles/indonesia-as-a-maritime-power-jokowis-vision-strategies-and-obstacles-ahead/>
- LIPI Press. (2020). *The Untold Story Java Southern Sea*
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(3).
- Mahan, A. (1991). *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*. In J. B. Hattendorf, Mahan on Naval Strategy. Annapolis: Naval Institute Press.
- Mariana, K. (2023). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pendekatan ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*). *Prosiding*.
- Marsetio, M. (2018). Perairan Bermasalah: Tantangan Maritim di Asia Pasifik. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(2), 1-14.
- Marsetio, M. (2013). *Developing Regional Naval Cooperation: The Indonesian Navy's Perspective*. Makalah disampaikan pada *International Maritime Security Conference (IMSC) As Part of IMDEX 2013*. Singapura, 15 Mei 2013.
- Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *JOURNAL ASRO*, 6, 1-22.
- Saraswati, A. L., dan Pinatih, N.K.D.S.A. (2020). Strategi Keamanan Maritim Indonesia terhadap Maritime Piracy di Laut Sulu Tahun 2016. *Jurnal Transformasi Global* Vol. 7 No. 1 [2020]. Universitas Brawijaya. DOI: 10.21776/ub.jtg.2020.007.01.6
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Ke19). CV. Alfabeta, hlm. 9
- Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 65-89.
- Tahara, T., dan Bahri, S. (2018). Nakodai Mara'dia Abanua Kaiyang Toilopi: Spirit Nilai Budaya Maritim Dan Identitas Orang Mandar. Walasuji: *Jurnal Budaya dan Sejarah*. DOI: <https://doi.org/10.36869/wjsb.v9i2.4.5>

Till.G. 2004. *Sea Power. A Guide For The Twenty-First Century*. London: Routledge.

Wiranto, S. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(2), 1-16.

Yudhistira, A., Suwarno, P., Aris, T., & Okcavia, S. C. (2022). Pemahaman Terhadap Maritime Security, Maritime Safety dan Maritime Defense serta Perbedaanya dalam Konsep Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kemaritiman Nusantara*, 2(1), 1-12.

Yuliarta, I. W., & Rahmat, H. K. (2021). Peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi sebagai upaya memperkuat keamanan maritim di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 180-189.